

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HAM DALAM KONFLIK AGRARIA PT BSMI DI KABUPATEN MESUJI (Studi pada masyarakat Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji)

Oleh

VIRDA ALTARIA PUTRI

Pelanggaran hak asasi manusia kini menjadi persoalan penting yang harus segera dibenahi dan segera diselesaikan oleh pemerintah. Pada kasus pelanggaran HAM PT BSMI terhadap masyarakat Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah Kuning Kabupaten Mesuji, berawal dari HGU yang dimiliki PT BSMI untuk mengelola tanah warga. Minimnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan AMDAL sehingga masyarakat merasa menderita selama 17 tahun. Selain itu, PT BSMI tidak melakukan realisasi atas perjanjian plasma dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan perusahaan menempatkan aparat keamanan negara yang dilengkapi persenjataan, terjadi konflik yang berujung pada kematian satu orang masyarakat Kagungan Dalam pada tanggal 10 November 2011.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasilnya menerangkan bahwa konflik ini menimbulkan analisa tiga aspek secara mendasar yaitu agraria, sosial dan manajemen. Dari ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan fakta dan realita terhadap Kesenjangan yang terjadi dilingkungan masyarakat, baik secara vertikal dan horizontal bahkan dengan skema segitiga keterkaitan antara Pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Hal tersebutlah kemudian memunculkan dua aspek penting melalui pendekatan HAM dan pendekatan lingkungan.

Ada dua hal penting yang dihasilkan dalam penelitian ini, **pertama** proses konflik atau penyebab konflik sehingga memunculkan isu HAM antara lain: (1) Kurang tegasnya pemerintah dalam penentuan batas kewenangan pengelolaan lahan, (2) Perusahaan Mengabaikan perjanjian RKL, RPL dalam dokumen Amdal, (3) Pemahaman dan kepastian tentang Hukum atau aturan berbeda, (4) Prilaku arogansi aparat keamanan, (5) Kendala Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mesuji, dan (6) Pendidikan dan ekonomi masyarakat miskin.

Kedua, penelitian ini menghasilkan bagaimana peran pemerintah dalam upaya penegakkan HAM antara lain: (1) Peran Kesbangpol, (2) Peran pengawasan pemerintah terhadap perlakuan buruh, (3) Peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan masyarakat, serta (4) Proses Regulasi ditolak masyarakat.

Keyword : Peran Pemerintah, Konflik Agraria, Hak Asasi Manusia